



Bab IX

Indikator Kinerja Daerah

Ukuran hasil kinerja atau keberhasilan suatu organisasi pemerintahan sesungguhnya tidak mudah diukur karena organisasi pemerintahan sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, pengukuran kinerja akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan visi dan misi kepala daerah. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran organisasi di masa kini maupun yang akan datang. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan.

Asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada:

1. Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan berdasarkan RPJMN 2014-2019; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
2. Tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
3. Penyelarasan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun 2011 s.d. 2016, untuk proyeksi 2016-2021.

Pertimbangan aspek-aspek regional dan permasalahan otonomi daerah layak dikemukakan sebagai materi bahasan dalam upaya pencapaian optimum IPM. Meskipun demikian, mengingat kemampuan realisasi pencapaian target indikator turunan IPM sangat dipengaruhi kemampuan fiskal daerah dan program pembangunan yang berorientasi IPM, serta ketersediaan ruang fiskal daerah, dengan demikian indikator turunan IPM ditetapkan dengan kisaran skala antara target RPJMN dan target berdasarkan rekomendasi.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam menyusun tata kelola pemerintahan di daerahnya adalah salah satu pemetaan potensi dan pendalaman peran (*role position*) pemerintahan daerah sebagai pihak yang memiliki nilai strategis dalam menjalankan pembangunan manusia. Otonomi Daerah adalah sebuah konsep besar yang memberikan ruang inovasi bagi daerah otonom (Kabupaten/Kota) untuk mengenali, menggali dan memberikan ciri unik pada potensi daerah nya masing-masing. Bertitik tolak dari peran dasar pemerintah daerah tersebut, maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang mampu mengusung isu-isu sentral daerah kedalam sebuah langkah kebijakan daerah. Isu sentral sektoral yang diusung instansi pusat harus mampu diterjemahkan secara menyeluruh dengan tidak meninggalkan isu-isu lokal.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Tangerang Selatan diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Tangerang Selatan. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

Indikator kinerja daerah diproyeksikan akan menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selanjutnya. Proyeksi indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.1 Proyeksi Jenis Indikator Makro Pembangunan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2016*	2017*	2018	2019	2020	
1	Jumlah Penduduk	1.543.209	1,593,812	1,644,889	1,696,308	1,747,906	1,799,605	1,851,254
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,36%	3.28%	3.20%	3.13%	3.04%	2.96%	2.87%
3	Indeks Pembangunan Manusia / IPM	79,38	79,40-79,45	79,42-79,52	79,44-79,60	79,46-79,67	79,49-79,74	79,51-79,81
4	Rata-rata Lamanya Sekolah / RLS (tahun)	11,57	11,575-11,580	11,580-11,590	11,585-11,600	11,590-11,610	11,595-11,620	11,600-11,630
5	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,61	13,615-13,620	13,620-13,630	13,625-13,640	13,630-13,650	13,635-13,660	13,640-13,670
6	Angka Harapan Hidup / AHH (Tahun)	72,12	72,124-72,125	72,125-72,127	72,126-72,129	72,127-72,131	72,128-72,133	72,129-72,135
7	Kemampuan Daya Beli (Juta Rp.) (PPP)	14,59	14,60-14,66	14,62-14,73	14,63-14,81	14,65-14,88	14,66-14,96	14,68-15,03
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE	7,25%	6% - 7,5%	6% - 7,5%	6% - 7,5%	6% - 7,5%	6% - 7,5%	6% - 7,5%
9	PDRB Atas Dasar Harga berlaku (Trilyun Rp.)	56,04	59,41-60,25	62,97-64,77	66,75-69,62	70,75-74,85	75,00-80,46	79,50-86,49
10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rp.)	45,68	48,42-49,10	51,32-52,78	54,40-56,74	57,66-61,00	61,12-65,57	64,79-70,49
11	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	36,32	37,27-37,80	38,28-39,37	39,35-41,04	40,48-42,82	41,68-44,71	42,94-46,72
12	Tingkat Inflasi	3,24%	3% - 6%	3% - 6%	3% - 6%	3% - 6%	3% - 6%	3% - 6%
13	Tingkat Kemiskinan	1,69%	1,68% - 1,95%	1,67% - 1,94%	1,66% - 1,93%	1,65% - 1,92%	1,64% - 1,91%	1,63% - 1,90%
14	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	98,31%	98,05%-98,32%	98,06%-98,33%	98,07%-98,34%	98,08%-98,35%	98,09%-98,36%	98,10%-98,37%
15	Tingkat Pengangguran	6,23%	6,22% - 12%	6,21% - 11,99%	6,20% - 11,98%	6,19% - 11,97%	6,18% - 11,96%	6,17% - 11,95%
16	Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	729	717-765	740-790	763-814	787-839	810-864	833-889
17	Indeks Pembangunan Gender	93,41	93,417-93,454	93,426-93,501	93,436-93,548	93,445-93,595	93,454-93,641	93,464-93,688
18	Indeks Pemberdayaan Gender	64,07	64,116-64,166	64,166-64,266	64,216-64,366	64,266-64,466	64,316-64,566	64,366-64,666

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAPPEDA :